

## **PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**

**Priastuti Andayani**  
*Universitas Islam Kediri, Kediri*

### **ABSTRACT**

*Government Accounting Standards is the accounting principles applied in preparing and presenting financial statements presented in the Government Regulation No. 71 Year 2010 accrual. This study aims to determine: (1) Preparedness Kediri Regency Government in implementing the Accrual Based Government Accounting Standards. (2) The preparation of financial statements in accordance Kediri Regency Government Accounting Standards Accrual Based Government.*

*The method used in this study is a qualitative method of secondary data sources: (1) Kediri Regency Government Financial Statements of the fiscal year 2015 consisted of the Budget Realization Report (LRA); Reports Budget Balance Changes Over (Statement of Changes SAL); Balance Sheet; Statements of Operations (LO); Cash Flow Statements (LAK); Statement of Changes in Equity (LPE); Notes to the Financial Statements (CaLK), (2) of Government Regulation No. 71 Year 2010 concerning the Government Accounting Standards. Analysis Techniques used: (1) Data Reduction (data reduction), (2) Data Display (Data Presentation), (3) Conclusion Drawing / verification.*

*From the results of research can be concluded that the District Government Kediri already fully apply the standard of preparation of financial statements accrual has been set in Government Regulation No. 71 of 2010 concerning the Government Accounting Standards and Conformity between the Financial Statements of the Government of Kediri with Government Regulation No. 71 of 2010 on Accounting Standards Government.*

*Keywords: Financial Statement, Accrual basic.*

### **ABSTRAK**

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah yang disajikan dalam PP No. 71 Tahun 2010 berbasis akrual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Kesiapan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. (2) Penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan sumber data sekunder : (1) Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri tahun anggaran 2015 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); Neraca; Laporan Operasional (LO); Laporan Arus Kas (LAK); Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Teknik Analisis yang digunakan : (1) *Data Reduction* (Reduksi data), (2) *Data Display* (Penyajian Data), (3) *Conclusion Drawing/verification*.

Dari hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kediri sudah sepenuhnya menerapkan standar penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kesesuaian antara Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kata Kunci : Laporan Keuangan, Basis Akrual

## PENDAHULUAN

Reformasi Keuangan Negara yang ditandai dengan lahirnya paket Undang-undang di bidang Keuangan Negara pada tahun 2003 dan 2004 mengamanatkan pentingnya tata kelola keuangan yang baik (*good governance*) yang antara lain berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta mengikuti *international best practices* yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.

Reformasi keuangan negara mencakup reformasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Hal ini ditandai dengan kewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan negara berupa laporan keuangan pemerintah yang setidaknya-tidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan Negara dan badan lainnya. Saat ini pemerintah telah menyusun Laporan Keuangan dengan Basis Kas Menuju Akruwal yang merupakan basis transisi sampai dengan akuntansi berbasis akrual sebagaimana ditetapkan dengan paket Undang-undang bidang keuangan Negara dapat diterapkan di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur bahwa tahun 2014 merupakan tahun terakhir pemerintah diperkenankan menggunakan basis akuntansi kas menuju akrual. Pada tahun 2015 pemerintah pusat dan daerah harus menerapkan akuntansi akrual. Kabupaten Kediri mulai tahun anggaran 2015 menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, maka peneliti bermaksud menganalisis Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal.

Berdasarkan uraian diatas, maka beberapa rumusan masalah yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana kesiapan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal.
- b. Bagaimana penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri sesuai

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal.

Dengan tujuan untuk mengetahui kesiapan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal dan mengetahui penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif karena penelitian ini akan mendeskripsikan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal. Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

### Jenis data

Jenis data yang digunakan peneliti adalah data kualitatif dengan sumber data sekunder yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri tahun anggaran 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada beberapa tahapan yaitu sebagai berikut :

#### a. *Data Reduction (Reduksi data)*

Reduksi data dilakukan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan dalam hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

- b. **Data Display (Penyajian Data)**  
Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan *flowchart*.
- c. **Conclusion Drawing/ verification**  
Langkah ini dilakukan dengan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Peneliti menarik kesimpulan yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri tahun 2015 telah sesuai atau belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pemerintah Kabupaten Kediri pada tahun anggaran 2015 yang lalu telah menyajikan laporan keuangannya berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan

berbasis akrual sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Dengan demikian subyek penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri tahun 2015.

**Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2015**

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri disusun untuk menyediakan informasi yang andal dan relevan mengenai posisi keuangan serta seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan daerah juga digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensinya, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Komponen laporan keuangan Kabupaten Kediri yang disusun dan disajikan terdiri dari :

**Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

| URAIAN   | ANGGARAN 2015 (Rp) | REALISASI 2015 (Rp) | %   | REALISASI 2014 (Rp) |
|--|--------------------|---------------------|-----|---------------------|
| 1  | 2                  | 3                   | 4   | 5                   |
| <b>PENDAPATAN – LRA</b>                                      | xxx.xxx.xxx        | xxx.xxx.xxx         | xxx | xxx.xxx.xxx         |
| <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA</b>                    | xxx.xxx.xxx        | xxx.xxx.xxx         | xxx | xxx.xxx.xxx         |
| Pendapatan Pajak Daerah                                      | xxx.xxx.xxx        | xxx.xxx.xxx         | xxx | xxx.xxx.xxx         |
| Pendapatan Retribusi Daerah                                  | xxx.xxx.xxx        | xxx.xxx.xxx         | xxx | xxx.xxx.xxx         |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | xxx.xxx.xxx        | xxx.xxx.xxx         | xxx | xxx.xxx.xxx         |
| Lain-lain PAD yang Sah                                       | xxx.xxx.xxx        | xxx.xxx.xxx         | xxx | xxx.xxx.xxx         |
| <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                   | xxx.xxx.xxx        | xxx.xxx.xxx         | xxx | xxx.xxx.xxx         |
| <b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>                  | xxx.xxx.xxx        | xxx.xxx.xxx         | xxx | xxx.xxx.xxx         |
| Bagi Hasil Pajak   | xxx.xxx.xxx        | xxx.xxx.xxx         | xxx | xxx.xxx.xxx         |
| Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam                    | xxx.xxx.xxx        | xxx.xxx.xxx         | xxx | xxx.xxx.xxx         |
| Dana Alokasi Umum (DAU)                                      | xxx.xxx.xxx        | xxx.xxx.xxx         | xxx | xxx.xxx.xxx         |
| Dana Alokasi Khusus (DAK)                                    | xxx.xxx.xxx        | xxx.xxx.xxx         | xxx | xxx.xxx.xxx         |
| Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan                           | xxx.xxx.xxx        | xxx.xxx.xxx         | xxx | xxx.xxx.xxx         |
| <b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya</b>        | xxx.xxx.xxx        | xxx.xxx.xxx         | xxx | xxx.xxx.xxx         |

| URAIAN   | ANGGARAN<br>2015<br>(Rp) | REALISASI<br>2015<br>(Rp) | %   | REALISASI<br>2014<br>(Rp) |
|--|--------------------------|---------------------------|-----|---------------------------|
| 1  | 2                        | 3                         | 4   | 5                         |
| Dana Penyesuaian   | xxx.xxx.xxx              | xxx.xxx.xxx               | xxx | xxx.xxx.xxx               |
| <b>Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya</b>     | xxx.xxx.xxx              | xxx.xxx.xxx               | xxx | xxx.xxx.xxx               |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA                        | xxx.xxx.xxx              | xxx.xxx.xxx               | xxx | xxx.xxx.xxx               |
| <b>Bantuan Keuangan</b>                                  | xxx.xxx.xxx              | xxx.xxx.xxx               | xxx | xxx.xxx.xxx               |
| Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya | xxx.xxx.xxx              | xxx.xxx.xxx               | xxx | xxx.xxx.xxx               |
| <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>              | xxx.xxx.xxx              | xxx.xxx.xxx               | xxx | xxx.xxx.xxx               |
| Pendapatan Lainnya                                       | xxx.xxx.xxx              | xxx.xxx.xxx               | xxx | xxx.xxx.xxx               |
| <b>BELANJA</b>   | xxx.xxx.xxx              | xxx.xxx.xxx               | xxx | xxx.xxx.xxx               |
| <b>BELANJA OPERASI</b>                                   | xxx.xxx.xxx              | xxx.xxx.xxx               | xxx | xxx.xxx.xxx               |
| Belanja Pegawai  | xxx.xxx.xxx              | xxx.xxx.xxx               | xxx | xxx.xxx.xxx               |
| Belanja Barang dan Jasa                                  | xxx.xxx.xxx              | xxx.xxx.xxx               | xxx | xxx.xxx.xxx               |
| Belanja Bunga  | xxx.xxx.xxx              | xxx.xxx.xxx               | xxx | xxx.xxx.xxx               |
| Belanja Hibah  | xxx.xxx.xxx              | xxx.xxx.xxx               | xxx | xxx.xxx.xxx               |
| Belanja Bantuan Sosial                                   | xxx.xxx.xxx              | xxx.xxx.xxx               | xxx | xxx.xxx.xxx               |
| <b>BELANJA MODAL</b>                                     | xxx.xxx.xxx              | xxx.xxx.xxx               | xxx | xxx.xxx.xxx               |
| Belanja Modal Tanah                                      | xxx.xxx.xxx              | xxx.xxx.xxx               | xxx | xxx.xxx.xxx               |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin                        | xxx.xxx.xxx              | xxx.xxx.xxx               | xxx | xxx.xxx.xxx               |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan                        | xxx.xxx.xxx              | xxx.xxx.xxx               | xxx | xxx.xxx.xxx               |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan                | xxx.xxx.xxx              | xxx.xxx.xxx               | xxx | xxx.xxx.xxx               |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                         | xxx.xxx.xxx              | xxx.xxx.xxx               | xxx | xxx.xxx.xxx               |
| Belanja Modal Aset Lainnya                               | xxx.xxx.xxx              | xxx.xxx.xxx               | xxx | xxx.xxx.xxx               |
| <b>BELANJA TAK TERDUGA</b>                               | xxx.xxx.xxx              | xxx.xxx.xxx               | xxx | xxx.xxx.xxx               |
| Belanja Tak Terduga                                      | xxx.xxx.xxx              | xxx.xxx.xxx               | xxx | xxx.xxx.xxx               |
| <b>TRANSFER</b>  | xxx.xxx.xxx              | xxx.xxx.xxx               | xxx | xxx.xxx.xxx               |
| <b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>                    | xxx.xxx.xxx              | xxx.xxx.xxx               | xxx | xxx.xxx.xxx               |
| Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah                         | xxx.xxx.xxx              | xxx.xxx.xxx               | xxx | xxx.xxx.xxx               |
| Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya                   | xxx.xxx.xxx              | xxx.xxx.xxx               | xxx | xxx.xxx.xxx               |
| <b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>                         | xxx.xxx.xxx              | xxx.xxx.xxx               | xxx | xxx.xxx.xxx               |
| Transfer Bantuan Keuangan Desa                           | xxx.xxx.xxx              | xxx.xxx.xxx               | xxx | xxx.xxx.xxx               |
| Transfer Bantuan Keuangan Lainnya                        | xxx.xxx.xxx              | xxx.xxx.xxx               | xxx | xxx.xxx.xxx               |
| <b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>                       | xxx.xxx.xxx              | xxx.xxx.xxx               | xxx | xxx.xxx.xxx               |
| <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>                               | xxx.xxx.xxx              | xxx.xxx.xxx               | xxx | xxx.xxx.xxx               |
| <b>PEMBIAYAAN</b>  | xxx.xxx.xxx              | xxx.xxx.xxx               | xxx | xxx.xxx.xxx               |
| <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                             | xxx.xxx.xxx              | xxx.xxx.xxx               | xxx | xxx.xxx.xxx               |
| Penggunaan SilPA   | xxx.xxx.xxx              | xxx.xxx.xxx               | xxx | xxx.xxx.xxx               |

| URAIAN  | ANGGARAN<br>2015<br>(Rp) | REALISASI<br>2015<br>(Rp) | %   | REALISASI<br>2014<br>(Rp) |
|---|--------------------------|---------------------------|-----|---------------------------|
| 1   | 2                        | 3                         | 4   | 5                         |
| Pencairan Dana Cadangan                           | xxx.xxx.xxx              | xxx.xxx.xxx               | xxx | xxx.xxx.xxx               |
| Penerimaan Kembali Piutang                        | xxx.xxx.xxx              | xxx.xxx.xxx               | xxx | xxx.xxx.xxx               |
| <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                      | xxx.xxx.xxx              | xxx.xxx.xxx               | xxx | xxx.xxx.xxx               |
| Pembentukan Dana Cadangan                         | xxx.xxx.xxx              | xxx.xxx.xxx               | xxx | xxx.xxx.xxx               |
| Penyertaan Modal / Investasi<br>Pemerintah Daerah | xxx.xxx.xxx              | xxx.xxx.xxx               | xxx | xxx.xxx.xxx               |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam<br>Negeri         | xxx.xxx.xxx              | xxx.xxx.xxx               | xxx | xxx.xxx.xxx               |
| <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>                           | xxx.xxx.xxx              | xxx.xxx.xxx               | xxx | xxx.xxx.xxx               |
| <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN<br/>ANGGARAN (SILPA)</b> | xxx.xxx.xxx              | xxx.xxx.xxx               | xxx | xxx.xxx.xxx               |

Tabel 1.6 menunjukkan bahwa Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Kediri tahun anggaran 2015 menyajikan informasi mengenai perhitungan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam satu tahun anggaran meliputi :

- a. Pendapatan – LRA, terdiri dari :
  - 1) Pendapatan asli daerah (PAD) – LRA.
  - 2) Pendapatan transfer.
  - 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- b. Belanja, terdiri dari :
  - 1) Belanja operasi.
  - 2) Belanja modal.

- 3) Belanja tak terduga.
- c. Transfer, terdiri dari :
  - 1) Transfer bagi hasil pendapatan.
  - 2) Transfer bantuan keuangan.
- d. Surplus / (defisit)
- e. Pembiayaan, terdiri dari :
  - 1) Penerimaan pembiayaan.
  - 2) Penerimaan pembiayaan.
- f. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

Laporan realisasi anggaran Kabupaten Kediri juga menyajikan realisasi anggaran tahun sebelumnya sebagai pembandingan dengan tahun sekarang.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

| URAIAN   | reff | TAHUN 2015  | TAHUN 2014  |
|--|------|-------------|-------------|
| 1  | 2    | 3           | 4           |
| Saldo Anggaran Lebih Awal                                      |      | xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx |
| Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan<br>Tahun Berjalan |      | xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx |
| Sub Total  |      | xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx |
|  |      | xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx |
| Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran<br>(SILPA/SIKPA)         |      | xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx |
| Sub Total  |      | xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx |
|  |      | xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx |
| Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun<br>Sebelumnya                |      | xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx |
| Lain-lain  |      | xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx |
|  |      | xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx |
| Saldo Anggaran Lebih Akhir                                     |      | xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx |

Tabel 1.7 menunjukkan bahwa Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2015 menyajikan secara komparatif dengan periode

sebelumnya pos-pos Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya, Lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Negara

| URAIAN   | reff | 31 DESEMBER<br>2015 | 31 DESEMBER<br>2014<br>(audited) |
|--|------|---------------------|----------------------------------|
| 1  | 2    | 3                   | 4                                |
| ASET   |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| ASET LANCAR  |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Kas di Kas Daerah                                    |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Kas di Bendahara Pengeluaran                         |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Kas di Bendaharan Penerimaan                         |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Kas di BLUD  |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Kas di Bendahara FKTP                                |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Kas di Bendahara BOS                                 |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Piutang Pajak  |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Piutang Retribusi                                    |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Piutang Bagi Hasil                                   |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Bagian Lancar Tagihan Penjualan<br>Angsuran          |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi                    |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Piutang Lainnya                                      |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Penyisihan Piutang                                   |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Belanja Dibayar di Muka                              |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Persediaan   |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Jumlah Aset Lancar                                   |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| INVESTASI JANGKA PANJANG                             |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Investasi non Permanen                               |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Pinjaman Kepada Perusahaan Negara                    |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah                    |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah<br>Lainnya         |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Investasi dalam Surat Utang Negara                   |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Investasi dalam Proyek Pembangunan                   |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Investasi Dana Bergulir                              |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Penyisihan Investasi Non Permanen –<br>Dana Bergulir |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Investasi Non Permanen Lainnya                       |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Penyisihan Investasi Non Permanen –<br>Lainnya       |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Jumlah Investasi Non Permanen                        |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Investasi Permanen                                   |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah                   |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Investasi permanen Lainnya                           |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Jumlah Investasi Permanen                            |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Jumlah Investasi Jangka Panjang                      |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| ASET TETAP   |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Tanah  |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |

| URAIAN   | reff | 31 DESEMBER<br>2015 | 31 DESEMBER<br>2014<br>(audited) |
|--|------|---------------------|----------------------------------|
| 1  | 2    | 3                   | 4                                |
| Peralatan dan Mesin  |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Gedung dan Bangunan  |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Jalan, Irigasi dan jaringan                                    |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Aset Tetap Lainnya   |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan                                    |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Akumulasi Penyusutan   |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Jumlah Aset Tetap  |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| <b>DANA CADANGAN</b>   |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Dana Cadangan  |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Jumlah Dana Cadangan   |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| <b>ASET LAINNYA</b>  |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Tagihan Penjualan Angsuran                                     |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Tuntutan Perbendaharaan  |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Tuntutan Ganti Rugi  |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Kemitraan Dengan Pihak Ketiga                                  |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Aset Tak Berwujud  |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Aset Lain-lain   |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Jumlah Aset Lainnya  |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| <b>JUMLAH ASET</b>   |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| <b>KEWAJIBAN</b>   |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>                                 |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)                           |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Utang Bunga  |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat            |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Daerah           |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank       |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Bagian lancar Utang Dalam Negeri – Obligasi                    |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Bagian lancar Utang Jangka Pendek Lainnya                      |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Utang jangka pendek Lainnya                                    |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek                                 |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>                                |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat                          |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Utang Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya                 |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank                     |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Utang Dalam Negeri – Lembaga                                   |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |

| URAIAN  | reff | 31 DESEMBER<br>2015 | 31 DESEMBER<br>2014<br>(audited) |
|---|------|---------------------|----------------------------------|
| 1   | 2    | 3                   | 4                                |
| Keuangan Bukan Bank   |      |                     |                                  |
| Utang Dalam Negeri – Obligasi                                       |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Utang Jangka Panjang - Lainnya                                      |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Jumlah kewajiban jangka panjang                                     |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>   |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| <b>EKUITAS DANA</b>   |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| <b>EKUITAS DANA LANCAR</b>  |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)                              |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Pendapatan yang Di tangguhkan                                       |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Cadangan Piutang  |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Cadangan Persediaan   |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Dana Yang Harus Disediakan Untuk<br>Pembayaran Utang Jangka Pendek  |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Jumlah Ekuitas Dana Lancar  |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
|   |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| <b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>                                       |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Diinvestasikan Dalam Investasi jangka<br>Panjang                    |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Diinvestasikan Dalam Aset Tetap                                     |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya                                   |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Dana Yang Harus Disediakan Untuk<br>Pembayaran Utang Jangka Panjang |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Jumlah Ekuitas Dana Investasi                                       |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
|   |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| <b>EKUITAS DANA CADANGAN</b>  |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan                                  |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| Jumlah Ekuitas Dana Cadangan  |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| <b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>  |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN<br/>EKUITAS</b>                             |      | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx.xxx              |

Tabel 1.8 menunjukkan bahwa Neraca merupakan laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu. Neraca Pemerintah Kabupaten Kediri tahun 2015 menyajikan pos-pos aset yang terbagi menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya. Kemudian kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Selain kedua pos tersebut, neraca Pemerintah Kabupaten Kediri juga menyajikan ekuitas dana yang terdiri dari Ekuitas dana lancar, Ekuitas dana investasi dan Ekuitas Dana Cadangan.

Laporan Operasional (LO)

| No.<br>Urut | Uraian                                       | Reff | Tahun<br>2015 | Tahun<br>2014 | Kenaikan /<br>(Penurunan) | % |
|-------------|--|------|---------------|---------------|---------------------------|---|
| 1           | 2  | 3    | 4             | 5             | 6                         | 7 |
|             | <b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>                  |      |               |               |                           |   |
|             | <b>PENDAPATAN - LO</b>                       |      |               |               |                           |   |
|             | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br/>- LO</b> |      |               |               |                           |   |

| No. Urut | Uraian  | Reff | Tahun 2015 | Tahun 2014 | Kenaikan / (Penurunan) | % |
|----------|---|------|------------|------------|------------------------|---|
| 1        | 2   | 3    | 4          | 5          | 6                      | 7 |
|          | Pendapatan Pajak Daerah - LO                                      |      |            |            |                        |   |
|          | Pendapatan Retribusi Daerah – LO                                  |      |            |            |                        |   |
|          | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO |      |            |            |                        |   |
|          | Lain-lain PAD yang Sah – LO                                       |      |            |            |                        |   |
|          | Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO                          |      |            |            |                        |   |
|          | <b>PENDAPATAN TRASNFER - LO</b>                                   |      |            |            |                        |   |
|          | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO                         |      |            |            |                        |   |
|          | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO               |      |            |            |                        |   |
|          | Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO                |      |            |            |                        |   |
|          | Bantuan Keuangan – LO   |      |            |            |                        |   |
|          | Jumlah Pendapatan Transfer - LO                                   |      |            |            |                        |   |
|          | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</b>                  |      |            |            |                        |   |
|          | Pendapatan Hibah – LO   |      |            |            |                        |   |
|          | Dana Darurat – LO   |      |            |            |                        |   |
|          | Pendapatan Lainnya – LO   |      |            |            |                        |   |
|          | Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah                       |      |            |            |                        |   |
|          | Jumlah pendapatan   |      |            |            |                        |   |
|          | <b>BEBAN</b>  |      |            |            |                        |   |
|          | <b>BEBAN OPERASI</b>  |      |            |            |                        |   |
|          | Beban Pegawai   |      |            |            |                        |   |
|          | Beban Barang dan Jasa   |      |            |            |                        |   |
|          | Beban Bunga   |      |            |            |                        |   |
|          | Beban Subsidi   |      |            |            |                        |   |
|          | Beban Hibah   |      |            |            |                        |   |
|          | Beban Bantuan Sosial  |      |            |            |                        |   |
|          | Beban Penyusutan dan Amortisasi                                   |      |            |            |                        |   |
|          | Beban Penyisihan Piutang  |      |            |            |                        |   |
|          | Beban Lain-lain   |      |            |            |                        |   |
|          | Jumlah Beban Operasi  |      |            |            |                        |   |
|          | <b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>                                       |      |            |            |                        |   |
|          | <b>BEBAN TRASNFER</b>   |      |            |            |                        |   |
|          | Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah                            |      |            |            |                        |   |
|          | Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya                      |      |            |            |                        |   |
|          | Beban transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah lainya       |      |            |            |                        |   |
|          | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke                                |      |            |            |                        |   |

| No. Urut | Uraian   | Reff | Tahun 2015 | Tahun 2014 | Kenaikan / (Penurunan) | % |
|----------|--|------|------------|------------|------------------------|---|
| 1        | 2  | 3    | 4          | 5          | 6                      | 7 |
|          | Desa   |      |            |            |                        |   |
|          | Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya              |      |            |            |                        |   |
|          | Beban Transfer Dana Otonomi Khusus                   |      |            |            |                        |   |
|          | Jumlah Beban Transfer                                |      |            |            |                        |   |
|          | Jumlah Beban   |      |            |            |                        |   |
|          | Jumlah Surplus/Defisit dari Operasi                  |      |            |            |                        |   |
|          | <b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b> |      |            |            |                        |   |
|          | <b>SURPLUS NON OPERASIONAL - LO</b>                  |      |            |            |                        |   |
|          | Surplus Penjualan Aset Non lancar – LO               |      |            |            |                        |   |
|          | Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO   |      |            |            |                        |   |
|          | Surplus dari Kegiatan Non Operasional lainnya – LO   |      |            |            |                        |   |
|          | Jumlah Surplus Non Operasional                       |      |            |            |                        |   |
|          | <b>DEFISIT NON OPERASIONAL - LO</b>                  |      |            |            |                        |   |
|          | Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO               |      |            |            |                        |   |
|          | Defisit Penyelesaian Kewajiban jangka panjang – LO   |      |            |            |                        |   |
|          | Defisit dari Kegiatan Non Operasional lainnya – LO   |      |            |            |                        |   |
|          | Jumlah defisit Non Operasional                       |      |            |            |                        |   |
|          | Jumlah surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional |      |            |            |                        |   |
|          | <b>POS LUAR BIASA</b>                                |      |            |            |                        |   |
|          | <b>PENDAPATAN LUAR BIASA - LO</b>                    |      |            |            |                        |   |
|          | Pendapatan Luar Biasa - LO                           |      |            |            |                        |   |
|          | Jumlah Pendapatan Luar Biasa                         |      |            |            |                        |   |
|          | <b>BEBAN LUAR BIASA</b>                              |      |            |            |                        |   |
|          | Beban Luar Biasa                                     |      |            |            |                        |   |
|          | Jumlah Beban Luar Biasa                              |      |            |            |                        |   |
|          | Pos Luar Biasa                                       |      |            |            |                        |   |
|          | <b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>                          |      |            |            |                        |   |

Tabel 1.9 menunjukkan bahwa Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2015 menyajikan pos-pos Pendapatan-LO dari kegiatan operasional terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO, Beban dari kegiatan operasional berupa Beban Operasi dan Beban Transfer. Juga disajikan pos Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional berupa Surplus Non Operasional-LO dan Defisit Non Operasional-LO, Pos luar biasa berupa Pendapatan Luar Biasa-LO dan Beban Luar Biasa, kemudian juga disajikan Surplus/defisit-LO.

Laporan Arus Kas (LAK)

| Uraian   | Reff | Tahun 2015 | Tahun 2014 (audited) |
|--|------|------------|----------------------|
| 1  | 2    | 3          | 4                    |
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>                                   |      |            |                      |
| Arus Kas Masuk :   |      |            |                      |
| Pendapatan Pajak Daerah  |      |            |                      |
| Pendapatan Retribusi Daerah  |      |            |                      |
| Dipisahkan   |      |            |                      |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah                                |      |            |                      |
| Dana Bagi Hasil Pajak  |      |            |                      |
| Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)                           |      |            |                      |
| Dana Alokasi Umum  |      |            |                      |
| Dana Alokasi Khusus  |      |            |                      |
| Dana Alokasi Khusus Tambahan   |      |            |                      |
| Dana Otonomi Khusus  |      |            |                      |
| Dana Penyesuaian   |      |            |                      |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak  |      |            |                      |
| Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya |      |            |                      |
| Pendapatan Bagi Hasil Lainnya  |      |            |                      |
| Pendapatan Hibah   |      |            |                      |
| Pendapatan Dana Darurat  |      |            |                      |
| Pendapatan Lainnya   |      |            |                      |
| Jumlah Arus Kas Masuk  |      |            |                      |
| Arus Kas Keluar :  |      |            |                      |
| Belanja Pegawai  |      |            |                      |
| Belanja Barang dan Jasa  |      |            |                      |
| Bunga  |      |            |                      |
| Subsidi  |      |            |                      |
| Hibah  |      |            |                      |
| Bantuan Sosial   |      |            |                      |
| Belanja Bantuan Keuangan   |      |            |                      |
| Belanja Tidak Terduga  |      |            |                      |
| Bagi hasil Pajak   |      |            |                      |
| Bagi Hasil Retribusi   |      |            |                      |
| Bagi Hasil Pendapatan lainnya  |      |            |                      |
| Jumlah Arus kas Keluar   |      |            |                      |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi                                   |      |            |                      |
| Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan            |      |            |                      |
| Arus Masuk Kas :   |      |            |                      |
| Pendapatan Penjualan atas Tanah  |      |            |                      |
| Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin                            |      |            |                      |
| Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan                            |      |            |                      |
| Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan                    |      |            |                      |
| Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap lainnya                             |      |            |                      |
| Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya                                   |      |            |                      |
| Pencairan Dana Cadangan  |      |            |                      |

| Uraian                                   | Reff | Tahun 2015 | Tahun 2014 (audited) |
|--|------|------------|----------------------|
| 1  | 2    | 3          | 4                    |
| Jumlah Arus Kas Masuk                    |      |            |                      |
| Arus Keluar Kas :                        |      |            |                      |
| Belanja Tanah                            |      |            |                      |
| Belanja Peralatan dan Mesin              |      |            |                      |
| Belanja Gedung dan Bangunan              |      |            |                      |
| Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan      |      |            |                      |
| Belanja Aset Tetap lainnya               |      |            |                      |
| Belanja Aset Lainnya                     |      |            |                      |
| Pembentukan Dana Cadangan                |      |            |                      |
| Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah     |      |            |                      |
| Jumlah Arus Kas Keluar                   |      |            |                      |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi |      |            |                      |

Tabel 1.10 menunjukkan bahwa Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.

Tabel 1.11  
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

| URAIAN   | reff | TAHUN 2015 | TAHUN 2014 |
|--|------|------------|------------|
| 1  | 2    | 3          | 4          |
| EKUITAS AWAL   |      |            |            |
| SURPLUS/DEFISIT-LO   |      |            |            |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN /KESALAHAN MENDASAR : |      |            |            |
| Koreksi Nilai Persediaan                                   |      |            |            |
| Selisih Revaluasi Aset Tetap                               |      |            |            |
| Koreksi ekuitas lainnya                                    |      |            |            |
| EKUITAS AKHIR  |      |            |            |

Tabel 1.11 menunjukkan bahwa Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2015 menyajikan pos-pos Ekuitas awal, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, dampak kumulatif perubahan kebijakan / kesalahan mendasar yaitu Koreksi Nilai Persediaan, Selisih Revaluasi Aset Tetap dan Koreksi ekuitas lainnya, serta Ekuitas akhir.

#### Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Pada Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2015 disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,

Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri tahun 2015 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemerintah Kabupaten Kediri sudah sepenuhnya siap dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, yang

- telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Dalam Penyusunan laporan Keuangan telah terdapat kesesuaian antara Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :
    - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam Laporan Keuangan pemerintah kabupaten Kediri menunjukkan bahwa Penyajian Informasi mengenai perhitungan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam satu tahun anggaran sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menerangkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan
    - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) dalam laporan Keuangan Pemerintah kabupaten Kediri menunjukan menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya sedangkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menerangkan bahwa Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya
    - c. Neraca dalam Laporan Keuangan pemerintah kabupaten Kediri merupakan laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu. Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menerangkan bahwa Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
    - d. Laporan Operasional (LO) dalam Laporan Keuangan pemerintah kabupaten Kediri menyajikan pos-pos Pendapatan-LO dari kegiatan operasional terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO, Beban dari kegiatan operasional berupa Beban Operasi dan Beban Transfer, sedangkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menerangkan bahwa Laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos terdiri dari Pendapatan-LO dari kegiatan operasional, Beban dari kegiatan operasional, Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada, Pos luar biasa, bila ada, Surplus/defisit-LO.
    - e. Laporan Arus Kas (LAK) dalam Laporan Keuangan pemerintah kabupaten Kediri menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran. Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menerangkan bahwa Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
    - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dalam Laporan Keuangan pemerintah kabupaten Kediri menyajikan pos-pos Ekuitas awal, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, dampak kumulatif perubahan kebijakan / kesalahan mendasar yaitu Koreksi Nilai Persediaan, Selisih Revaluasi Aset Tetap dan Koreksi ekuitas lainnya, serta Ekuitas akhir. Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menerangkan bahwa Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos terdiri dari Ekuitas awal, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, Koreksi-koreksi yang langsung

- menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dalam Laporan Keuangan pemerintah kabupaten Kediri disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menerangkan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  
 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  
[Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010](#)  
 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan  
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah  
 Cristy Soputan, Julie J Sondakh, Steven Tangkuman, "Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Berdasarkan Pp Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Di Provinsi Sulawesi Utara", Jurnal EMBA 592, Vol.3 No.1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan

Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado.  
 Etrin Damayanti, 2012, "Analisis Implementasi Basis Akrual pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Berbasis Cash Towards Accrual tahun anggaran 2007 – 2009", Skripsi pada Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi Depok, Universitas Indonesia.  
 Fitria Ayu Lestari Niu, Herman Karamoy, Steven Tangkuman, 2014, Analisis Penerapan PP. No. 71 tahun 2010 dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu, Universitas Sam Ratulangi Manado, Jurnal EMBA, Vol.2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi.  
 Friska Langelo, David Paul Elia Saerang, Stanly Winyson Alexander, "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung", Jurnal EMBA 1 Vol.3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado  
 Halim, Abdul. 2013. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Keempat. Salemba Empat, Jakarta.  
 Ihwan Kema, 2013, "Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Kota Manado", Jurnal EMBA Vol.1 No.3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado.  
 Muhamad Indra Yudha Kusuma, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi Akrual pada Pemerintah", Skripsi pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro (Semarang: Universitas Diponegoro, 2013)  
 Tanjung. Abdul Hafiz. 2012. Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual. Alfabeta. Bandung.  
 Wasik Nista Rintiani, 2014, "Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah  
No 71 Tahun 2010”, jurnal ekonomi,  
Manajemen, Universitas Negeri  
*Surabaya.*